

**PENGARUH INVESTASI PADA
USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN BULUNGAN**

SKRIPSI

*Sebagai satu diantara persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi*

Oleh :

ANGGI PRAMITASARY
NPM. 201742003



**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS KALTARA
2021**

**PENGARUH INVESTASI PADA
USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN BULUNGAN**

SKRIPSI

*Sebagai satu diantara persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi*

Oleh :

ANGGI PRAMITASARY
NPM. 201742003

**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS KALTARA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH INVESTASI PADA
USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN BULUNGAN**

Oleh :

ANGGI PRAMITASARY
NPM. 201742003

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama,



Adi Aspian Nur. S.E., M.Si
NIDN. 1123108301

Mengetahui,
Ketua Jurusan



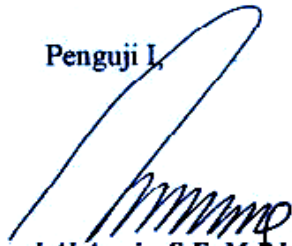
Sund Erna Fauziah. S.E., S.H., M.Hp., M.M
NIDN. 1110087601

SKRIPSI INI TELAH DI UJI

Pada Tanggal 29 Maret 2021

Penguji :

Penguji I,



Machmud Al Amrie. S.E., M.Pd
NIDN. 1104046901

Penguji II,



Suud Ema Fauziah. S.E., S.H., M.Hp., M.M
NIDN. 1110087601

Penguji Pembimbing,



Adi Aspian Nur. S.E., M.Si
NIDN. 1123108301

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanjung Selor, 29 Maret 2021

Mahasiswa,



Anggi Pramitasary

RIWAYAT HIDUP



Anggi Pramitasary lahir pada tanggal 01 Juni 1999 di Tanjung Palas, merupakan putri kedua dari Bapak Muhammad Samsuri (Alm) dan Ibu Kurniati. Memulai Pendidikan TKIT Nurul Hikmah Tanjung Palas Pada tahun 2004-2005. Lanjut tingkat dasar di Sekolah Dasar (SDN) Negeri 004 di Tanjung Palas dan Lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama melanjutkan lagi Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) Negeri 1 Tanjung Palas dan Lulus pada tahun 2014. Jenjang Pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Palas dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2017.

Melanjutkan Pendidikan Akademis pada tahun 2017 pada Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara Tanjung Selor dengan memilih jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada tahun 2020 melakukan program Kuliah Kerja Nyata angkatan IX di Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

Tanjung Selor, 29 Maret 2021

ANGGI PRAMITASARY

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan kepada:
Allah SWT , karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan
sehingga dapat menyelesaikan studi di universitas kaltara.
Ayahanda Muhammad Samsuri (Alm) dan Ibunda Kurniati,
Saudara-saudara dan seluruh keluarga
yang selalu memberikan semangat dan doa untukku, serta
Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan terkhusus
untuk dosen wali dan juga untuk dosen pembimbing
pak Adi Aspian Nur yang telah sabar membimbing
dan memberikan arahan sehingga bisa
menyelesaikan pendidikan akademis.*

KATA PENGANTAR

Berkat Ridho Allah SWT, Skripsi yang merupakan laporan penelitian sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi ini dapat diselesaikan. Selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdul Jabarsyah Ibrahim, M.SC selaku Rektor Universitas Kaltara Tanjung Selor dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara, yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis selama studi di Fakultas Ekonomi sampai akhir dari penyelesaian skripsi.
2. Staf pengajar Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Pembangunan kepada penulis.
3. Bapak Adi Aspian Nur, M.Si. sebagai pembimbing utama yang telah mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari persiapan dan selama penelitian hingga selesainya skripsi.
4. Staf Administrasi Fakultas Ekonomi yang telah memfasilitasi dan melayani penulis selama studi di Fakultas Ekonomi sampai selesainya skripsi ini.
5. Untuk teman-teman saya (Elda.S, Putri.P, Kurnia, Kak Ana, Kak Lia) Yang telah memberi saya semangat membuat tawa setiap hari. Serta rekan-rekan Mahasiswa/I, khususnya angkatan 2017 jurusan ekonomi pembangunan saya ucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 29 Maret 2021



Penulis

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi yang ditanamkan pada industri kecil menengah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara Field Work Research (Riset Lapangan, Library Research (Riset Penelitian) serta The Internet. Hipotesis yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah bahwa investasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi sederhana atau OLS (*Ordinary Least Square*) metode kuadrat terkecil.

Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa investasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan. Dengan kata lain jika investasi yang ditanamkan pada industri kecil menengah sebesar satu juta rupiah maka diprediksi penyerapan tenaga kerja akan bertambah sebesar seribu orang.

Kata Kunci : UKM, Investasi, Bulungan.

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of investment in small and medium industries on labor absorption in Bulungan Regency. The study uses data collection techniques in Field Work Research (Field Research), Library Research (Research Research) and The Internet. The hypothesis put forward by the author in this study is that investment has a positive data analysis on employment in Kaabupaten Bulungan. Data analysis used in this research is simple regression or OLS (Ordinary Least Square) least squares method. The results of the analysis obtained show that investment has a positive effect on employment in Bulungan Regency. In other words, if the investment invested in small and medium-sized industries is on million rupiah, it is predicted that the employment will increase by one thousand people.

Keywords : UKM, Investasion, Bulungan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	5
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II DASAR TEORI	25
A. Perkembangan Industri di Indonesia	25
B. Teori Investasi	33
C. Kesempatan Kerja	40
D. Definisi Konsepsional	40
ix	
E. Kerangka Pikir	42
F. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Definisi Operasional	43
B. Rincian Data Yang Diperlukan	44
C. Jangkauan Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Kabupaten Bulungan	51
B. Perkembangan Industri di Kabupaten Bulungan.....	53
C. Perkembangan Investasi di Kabupaten Bulungan.....	56
BAB V ANALISIS PEMBAHASAN	62
A. Analisis	62
B. Pembahasan	63
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini, kata “Persaingan di Pasar Global” ibarat hantu bagi pelaku ekonomi dan bisnis di tanah air. Sebab, di sadari bahwa Indonesia merupakan negara ekonomi biaya tinggi. Globalisasi sendiri diistilahkan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. (Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia : 2006).

Menurut Minto (2005) Bagi Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan krisis moneter tahun 1997 yang berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan menyebabkan menurunnya tingkat investasi sektor perusahaan. Bagi Kabupaten Bulungan sendiri saat ini yang diperlukan ialah pembangunan kawasan usaha, bukan sekedar perbaikan sektor-sektor usaha yang rusak akibat krisis. Alasannya karena pembangunan kawasan usaha merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, khususnya investasi sektor baik investor domestik maupun asing (Minto, 2005).

Menurut Asshiddiqie (2006) dari pengalaman sejarah membuktikan bahwasanya usaha kecil menengah merupakan simbol dan sebuah kebangkitan ekonomi Indonesia, karena kita ketahui bersama di era krisis dan sampai saat ini usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan

roda perekonomian bangsa. Sejak otonomi bergulir tahun 2001, pembangunan memang terasa lebih meningkat seiring dengan adanya dana perimbangan berbagai kegiatan yang dilakukan terasa lebih mudah dan dapat dilaksanakan dengan semestinya. Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah tidak saja tergantung kepada kemauan kuat aparaturnya pemerintah pusat yang diharapkan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada aparaturnya pemerintahan di daerah, melainkan terletak pada keprakarsaan dan kesungguhan aparaturnya di daerah sendiri untuk memberi arti dan meningkatkan kualitas kemandirian daerah itu sendiri. Bahkan, sejatinya kebijakan otonomi daerah itu harus pula diartikan terletak pada kemandirian, keprakarsaan, dan kreatifitas warga masyarakat daerah sebagai keseluruhan. Artinya, otonomi daerah itu bermakna ganda, yaitu otonomi Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, dan juga otonomi masyarakat di daerah itu dari Pemerintah Daerahnya. Karena itu, agenda otonomi daerah haruslah diimbangi dan dibarengi oleh partisipasi dari bawah, baik dalam arti formal oleh institusi pemerintahan di daerah maupun dalam arti substansial oleh para pelaku ekonomi dan institusi masyarakat di tingkat lokal.

Di Kabupaten Bulungan sendiri usaha kecil menengah sangatlah menjamur dan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi terciptanya kesempatan kerja baru.

Menurut Mudjiono (2005) untuk menunjang usaha yang ada perlu adanya fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi terhadap pesatnya perubahan teknologi dan pasar. Untuk itu usaha kecil menengah perlu terus didukung dan dikembangkan

agar dapat lebih berperan dalam mengatasi kesenjangan antar golongan pendapatan kerja itu sendiri, lebih dan itu agar mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.

Angkatan kerja di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Bulungan dan tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 5,95% pertahunnya yang merupakan tingkat angkatan kerja tertinggi kedua di seluruh Indonesia setelah propinsi Lampung yang mempunyai tingkat kenaikan sebesar 6,48% pertahun. Namun apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kesenjangan, oleh karena itu perlu adanya penciptaan iklim usaha yang sejak dengan kemudahan birokrasi, sehingga diharapkan mampu memacu proses pertumbuhan industri nasional dan regional yaitu dengan cara meningkatkan program pembinaan dan pengembangan usaha, khususnya usaha kecil menengah.

Sampai saat ini di Kabupaten Bulungan sendiri perkembangan usaha kecil menengah sendiri sangat menggembirakan. Hal ini tidak lepas dari peran serta Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam usaha menggalakkannya, sehingga dengan sendirinya dapat memberikan peluang-peluang atau kesempatan kerja bagi para pencari kerja ataupun penduduk yang ada.

Pelaksanaan pembangunan saat ini dilakukan secara berkesinambungan yang mencakup segala bidang kehidupan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup rakyat dalam suatu rangkaian usaha dan kegiatan. Dengan kata

lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan pemerataan sebaik mungkin. Dengan adanya kesempatan kerja yang luas yang terserap oleh sektor usaha dengan sendirinya akan mengurangi beban pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap masalah pengangguran, sehingga dapat menjadikan kondisi perekonomian yang tidak hanya tergantung pada satu sektor saja seperti pertanian dan sektor-sektor lainnya.

Berdasarkan potensi yang tersedia maka usaha khususnya menengah dan kecil dalam kegiatannya memerlukan teknologi tepat guna dan memiliki daya tampung tenaga kerja yang optimal sehingga mampu mendukung perekonomian daerah, utamanya perekonomian masyarakat serta mampu mendukung perkembangan sektor lainnya, terutama disektor perdagangan dalam arti luas (Kabupaten Bulungan. go.id).

Program pembangunan sektor usaha merupakan program nasional sehingga dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha bagi pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat (Kabupaten Bulungan. go.id).

Sektor usaha kecil menengah mempunyai peranan yang cukup strategis dalam kerangka pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah karena mampu memberikan sumbangan yang nyata terhadap pembangunan dalam arti yang luas dan mampu mengikutsertakan potensi masyarakat dalam kegiatan Usaha (Kabupaten Bulungan. go.id).

“Arah pembangunan jangka panjang untuk menjadikan daerah usaha yang maju dengan dukungan sektor primer yang kuat menjadi pegangan bagi

pembangunan usaha yang dicanangkan sesuai daerah masing-masing karena di dalam GBHN juga dengan jelas menandakan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Anonim, 1993:32).

Disamping itu semua untuk dapat meningkatkan perkembangan usaha yang tinggi atau terus meningkat setiap tahunnya, perlu adanya pengembangan investasi karena sektor usaha cukup potensial untuk dikembangkan. Perkembangan usaha kecil menengah jelas sekali kelihatan adanya peningkatan investasi diakibatkan karena meningkatnya permintaan produk yang dihasilkan oleh usaha kecil menengah dengan kata lain pasar untuk produksi usaha lebih luas dan memiliki prospek yang baik.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Investasi pada Usaha Kecil Menengah terhadap penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bulungan”**.

B. Perumusan Masalah

Pada latar belakang dijelaskan bahwa keadaan dan perkembangan sektor usaha di Kabupaten Bulungan tidak bisa lepas dari peningkatan investasi yang ditanamkan dan juga peranan pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Usaha meningkatnya perkembangan usaha juga akan menciptakan suatu kesempatan kerja yang luas (Kabupaten Bulungan.go.id). Sehingga dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “ **Bagaimanakah Pengaruh Investasi Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bulungan** “.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh investasi pada sektor Usaha Kecil Menengah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan.

Kegunaan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi para pengusaha usaha di Kabupaten Bulungan dan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bulungan serta seluruh pihak-pihak yang membutuhkan dalam rangka mengadakan penelitian selanjutnya.
2. Sebagai bahan kajian lebih lanjut, bagi lembaga pendidikan baik sebagai laporan penelitian maupun penelitian ilmiah yang lebih mendalam.
3. Sebagai sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini.
4. Sebagai bahan referensi bagi yang memerlukan.

BAB II

DASAR TEORI

A.Perkembangan Usaha di Indonesia

Pengertian usaha merupakan pengertian yang luas bila dibandingkan dengan pengertian perusahaan atau plant (satu unit dalam perusahaan). Winardi (1989: 181) pengertian usaha adalah “ Usaha untuk produktif terutama dalam bidang produksi satu perusahaan-perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa misalnya transpor atau perkembangan yang mempergunakan modal dan tenaga kerja dalam jumlah relatif besar”.

Usaha secara umum dapat diartikan sebagai kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba (Wikipedia : 2007).

Istilah usaha juga digunakan bagi suatu bagian produksi ekonomi yang terfokus pada proses manufakturisasi tertentu yang harus memiliki permodalan yang besar sebelum bisa meraih keuntungan. Dalam kasus ini sebenarnya lebih tepat disebut usaha besar (Wikipedia : 2007).

Dalam perencanaan ekonomi dan wilayah urban, kawasan usaha adalah penggunaan lahan dan aktivitas ekonomi secara intensif yang berhubungan dengan manufakturisasi dan produksi (Wikipedia : 2007).

Sedangkan menurut A. Abdurrachman (1992:533) memberikan pendapatnya tentang usaha “Pada umumnya ialah semua kegiatan ekonomi bukan

agraris atau bersifat distribusi dalam pengertian ini istilah itu meliputi usaha pembuatan barang di pabrik, cara-cara mengerjakannya dan pertambangan”.

Di Indonesia Pembangunan usaha dikembangkan secara bertahap dan terpadu. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam GBHN yang lebih lanjut.

Anonim (1993:62) menyatakan sebagai berikut:

“Pembangunan usaha dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui pembangunan keterkaitan antara usaha dan sektor ekonomi yang lainnya, terutama dengan sektor ekonomi yang memasok bahan baku usaha melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal dan penyebaran pembangunan usaha di berbagai daerah.” Dengan demikian sektor usaha diharapkan sebagai elemen strategis yang mendinamiskan seluruh sektor perekonomian untuk sampai pada tingkat pertumbuhan yang mapan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual-Departemen Hukum dan Hal Asasi Manusia, Republik Indonesia) bahwa yang dimaksud dengan desain usaha adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas usaha, atau kerajinan tangan (Pasal 1 Ayat 1).

Usaha kecil dapat juga didefinisikan sebagai perusahaan (establishment) yang mengkaryakan 5-19 pekerja (Kuncoro : 2001,189)

Kriteria usaha sendiri ada beberapa versi tergantung dengan instansi mana yang membuat pengelompokkan. Contohnya usaha kecil, menurut Undang-Undang

No. 9 Tahun 1995, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan milik warga negara Indonesia sementara itu, kriteria usaha menengah berdasarkan instruktur Presiden No. 10 tahun 1999 antara lain:

1. Pertama, nilai kekayaan bersih yang dimiliki lebih besar dan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Kedua, milik warga negara Indonesia
3. Ketiga, berdiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
4. Keempat, berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum (Samarinda.go.id).

Kriteria yang disusun oleh badan Pusat Statistik, perusahaan usaha pengolahan dibagi dalam empat (4) golongan :

1. Pertama, usaha rumah tangga adalah suatu kegiatan usaha usaha yang memiliki tenaga kerja 1 sampai dengan 4 orang.

2. Kedua, usaha kecil adalah suatu kegiatan usaha usaha yang memiliki tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.
3. Ketiga, usaha menengah adalah suatu kegiatan usaha usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.
4. Keempat, usaha besar adalah suatu kegiatan usaha usaha yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih.

Kriteria yang disusun oleh Departemen Perusahaan dan Perdagangan, eq. Direktorat Jenderal Usaha Dagang Kecil Menengah yang dituangkan dalam surat Keputusan menteri Perusahaan dan Perdagangan No. 589/MPRJKEP/10/1999 antara lain :

1. Pertama, usaha kecil adalah suatu kegiatan usaha usaha yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Kedua, usaha kecil menengah adalah usaha usaha dengan nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara itu usaha besar apabila nilai investasinya diluar tanah dan bangunan melebihi Rp. 1.000.000.0000,- (dengan jumlah buruh lebih dan 100 orang).

Diharapkan pula pada fase selanjutnya sektor usaha kecil dapat tumbuh mandiri sesuai dengan yang di inginkan oleh pemerintah, yakni pembangunan yang utuh dan menyeluruh.

Usaha adalah usaha yang mengelolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi bahan jadi. Dalam kegiatan usaha ini merupakan kumpulan beberapa pabrik yang sejenis.

Usaha kecil menengah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Usaha yang menggunakan mesin dan mempekerjakan karyawan antara 20 sampai dengan 50 orang.
2. Usaha yang tidak menggunakan mesin tetapi mempekerjakan karyawan antara 20 sampai dengan 50 orang.

Menurut Suryana (2000) Penjelasan Khusus Sektor Perusahaan dan Perdagangan

I. Sektor Usaha

Sektor Usaha secara umum meliputi 3 kelompok yaitu :

- A. Kelompok Usaha Kimia, Agro dan Hasil Hutan
- B. Kelompok Usaha Logam, Mesin dan Aneka
- C. Kelompok Usaha Kecil dan Menengah

Penjelasan khusus sektor usaha:

1. Izin Usaha Usaha (IUI) diberikan untuk masing-masing jenis usaha yang mencakup berbagai komoditi usaha didalam lingkup jenis usahanya.
2. Bagi perusahaan yang telah memiliki IUI diberikan kebebasan untuk mengadakan peningkatan produksi, diversifikasi produksi, rehabilitasi dan atau modernisasi sepanjang produksinya tercakup dalam lingkup jenis usahanya, dengan tambahan kapasitas tidak melebihi 30% dari

kapasitas izin yang dimiliki tanpa diwajibkan memiliki Izin Perluasan (IP) terlebih dahulu.

3. Beberapa batasan tentang perluasan, diversifikasi dan restrukturisasi usaha di sektor usaha:
 - a. Perluasan perusahaan usaha adalah penambahan kapasitas produksi dan atau jenis produk atau barang yang telah diizinkan.
 - b. Diversifikasi usaha adalah perubahan dan atau penambahan jenis produksi, tanpa menambah investasi untuk alat produksi utama tanpa mengakibatkan peningkatan kapasitas produksi lebih dari 30%.
 - c. Restrukturisasi adalah rehabilitasi/rekondisi, penggantian dan atau penambahan mesin-mesin/peralatan pabrik, barang modal lainnya, dan komponen-komponennya baik dalam keadaan baru ataupun bukan baru yang dengan tujuan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, diversifikasi, dan peningkatan volume/kapasitas produksi maksimum 30% dari kapasitas terpasang sebagaimana yang tercantum dalam Izin Usaha Usaha (IUI).
4. Produk-produk usaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), kecuali produk-produk yang belum distandarkan.
5. Barang-barang hasil produksi baik berupa bahan baku, hasil setengah jadi maupun barang jadi obat-obatan, obat tradisional, kosmetika, alat

kesehatan, makanan dan minuman sebelum dipasarkan harus didaftarkan terlebih dahulu pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM).

II. SEKTOR JASA PENUNJANG USAHA

Kawasan Usaha

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1996 tanggal 4 Juni 1996 dan Surat Keputusan Menteri Perusahaan dan Perdagangan No. 50/MPP/Kep/2/1997 tanggal 20 Pebruari 1997:

1. Kawasan Usaha adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Usaha.
2. Luas Kawasan Usaha sekurang-kurangnya 20 hektar.
3. Tanah yang dimiliki oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang luasnya sekurang-kurangnya 10 hektar di dalam kawasan peruntukan usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta sudah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, dapat ditetapkan sebagai Kawasan Usaha. Perusahaan tersebut diatas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan perusahaan kawasan usaha.
4. Perusahaan Kawasan Usaha berkewajiban untuk:

- a. menyediakan lahan Usaha Siap Pakai dan atau Bangunan Pabrik Siap Pakai;
- b. membuat Rencana Tapak Kawasan Usaha sesuai dengan Ketentuan Pemerintah Daerah;
- c. menyusun AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL);
- d. membangun dan memelihara prasarana dan utilitas seperti jalan, saluran drainage, pipa pengumpul limbah usaha, membangun, mengoperasikan dan memelihara unit pusat pengolahan limbah;
- e. membuat tata tertib Kawasan Usaha antara lain berisikan ketentuan-ketentuan hak/kewajiban perusahaan kawasan dan perusahaan usaha di dalam kawasan, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, pengoperasian fasilitas sosial/fasilitas umum.

III. SEKTOR PERDAGANGAN

Ketentuan sektor perdagangan mengacu kepada peraturan:

1. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1996 jo. No. 42 Tahun 1997 jo. No. 16 Tahun 1998 jo. No. 46 Tahun 1998 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor dan berdasarkan PP No. 36 Tahun 1977 jo. No. 35 Tahun 1996 jo. No. 41 Tahun 1997 jo. No.15 Tahun 1998 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan.

2. Keputusan Menteri Perusahaan dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998 jo. No. 159/MPP/Kep/4/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan dan Keputusan Menteri Perusahaan dan Perdagangan No. 160/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Atas Keputusan No. 77/Kp/78 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas Bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal.

Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Kegiatan sektor perdagangan terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu:

- A. Sub sektor perdagangan luar negeri:
 1. Perdagangan ekspor;
 2. Perdagangan impor.
- B. Sub sektor perdagangan dalam negeri:
 1. Perdagangan partai besar;
 2. Perdagangan eceran;
 3. Perdagangan informal

A. SUB SEKTOR PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1. Perdagangan Ekspor

Perdagangan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Perdagangan ekspor dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing atau perusahaan patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.
- b. Perusahaan yang dapat melakukan kegiatan ekspor tersebut adalah perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang produksi, di bidang perdagangan ekspor dan impor, di bidang perdagangan besar/distributor (*wholesaler*) dan di bidang perdagangan eceran (*retailer*) skala besar.
- c. Jenis barang yang dapat diekspor oleh perusahaan penanaman modal adalah barang hasil produksinya sendiri dan hasil produksi dari perusahaan lain di dalam negeri seperti hasil pertanian, kehutanan, pertambangan, usaha dan sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perdagangan Impor

Perdagangan impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. Perdagangan impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).

1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang dimiliki perusahaan penanaman modal untuk melakukan impor mesin-mesin, suku cadang, bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri dapat diberlakukan sebagai Angka Pengenal Importir Umum (APIU);

2) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang dimiliki perusahaan penanaman modal di bidang perdagangan impor dapat diberlakukan sebagai Angka Pengenal Importir Umum (APIU).

b. Perdagangan impor dapat dilaksanakan oleh perusahaan penanaman modal yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing atau oleh perusahaan patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia;

- c. Perusahaan yang dapat melaksanakan perdagangan impor tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi, di bidang perdagangan ekspor dan impor, di bidang perdagangan besar/distributor (*wholesaler*) dan di bidang perdagangan eceran (*retailer*) skala besar;
- d. Jenis barang yang dapat diimpor oleh perusahaan penanaman modal adalah mesin-mesin, suku cadang, bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri dan barang-barang lainnya yang kegunaannya berkaitan dengan jenis kegiatan usaha perdagangan yang diizinkan di dalam negeri.

B. SUB SEKTOR PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1. Kegiatan perdagangan di dalam negeri dapat dilaksanakan oleh perusahaan penanaman modal yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing atau oleh perusahaan patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

2. Perusahaan yang dapat melaksanakan kegiatan perdagangan dalam negeri tersebut adalah perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang produksi, dibidang perdagangan ekspor dan impor, di bidang perdagangan besar/distributor (*wholesaler*) dan di bidang perdagangan eceran (*retailer*) skala besar.
3. Perusahaan penanaman modal dibidang produksi dapat melakukan kegiatan perdagangan di dalam negeri untuk:
 - a. pembelian mesin-mesin, suku cadang (*spareparts*), bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolong di dalam negeri guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
 - b. pembelian barang dan atau bahan hasil produksi di dalam negeri untuk keperluan ekspor;
 - c. promosi, penelitian pasar dan pengawasan penjualan hasil produksi sendiri;
 - d. penjualan hasil produksi sendiri kepada perusahaan lain yang menggunakan hasil produksi tersebut sebagai barang modal, suku cadang, bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolong bagi proses produksinya;
 - e. penjualan barang hasil produksi dari perusahaan lain;

- f. penjualan hasil produksinya sendiri untuk pasaran dalam negeri sampai pada tingkat pengecer (*retailer*) untuk perusahaan PMA dan sampai pada konsumen akhir untuk perusahaan PMDN.
- 4. Perusahaan penanaman modal asing di bidang perdagangan ekspor dan impor, dapat melakukan kegiatan perdagangan di dalam negeri yaitu untuk:
 - a. pembelian barang dan atau bahan dalam negeri untuk diekspor.
 - b. penjualan barang di dalam negeri sebagai perdagangan besar/distributor/ *wholesaler*.
 - c. penjualan barang di dalam negeri sebagai perdagangan eceran (*retailer*) skala besar.

C. LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1. Pedagang Besar (*Wholesaler*)

- a. Pedagang besar (*wholesaler*) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen akhir harus menunjuk perusahaan nasional sebagai agen.

b. Termasuk pedagang besar (*wholesaler*) adalah:

- 1) distributor utama;
- 2) perkulakan (grosir);
- 3) sub distributor;
- 4) pemasok besar/*main supplier*;
- 5) dealer besar;
- 6) agen tunggal pemegang merek;
- 7) eksportir;
- 8) importir.

c. Tenaga kerja asing diperkenankan bekerja pada perusahaan PMA

dibidang perdagangan besar (*wholesaler*) dengan ketentuan:

- 1) maksimal 10 orang berlatar belakang pendidikan S1 atau setara dengan S1 dan berpengalaman kerja minimal 3 tahun di bidangnya sebagai *technical assistance* (pembantu teknis);
- 2) untuk setiap 1 orang TKA, wajib mempekerjakan minimal 3 orang TKI sebagai tenaga ahli atau tenaga administrasi;
- 3) TKA tidak dibenarkan menduduki jabatan di bidang personalia.

d. Kewajiban lain bagi perusahaan PMA dibidang perdagangan besar (*wholesaler*) adalah:

- 1) Menerbitkan daftar harga yang dijual yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) serta dicantumkan pada masing-masing barang yang dijual;
 - 2) Menguasai gudang, mempunyai jaminan transportasi dan menerapkan manajemen modern;
 - 3) Bertanggung jawab atas purna jual terhadap jaminan mutu, daya tahan dan kehandalan operasional barang yang dijual minimal 1 tahun, khususnya untuk Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan Agen Penjualan Pemegang Merek (AJPM);
 - 4) Apabila berlokasi di Daerah Tingkat II harus bermitra dengan usaha kecil/koperasi.
- e. Larangan bagi perusahaan dibidang perdagangan besar (*wholesaler*) adalah:
- 1) merangkap sebagai pengecer (*retailer*) atau sebagai pedagang informal;
 - 2) menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang untuk tujuan spekulasi dan barang-barang yang sifatnya berbahaya.

2. Pedagang Pengecer (*Retailer*)

- a. Pedagang pengecer (*retailer*) adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil.
- b. Pasar Modern yang merupakan pedagang eceran skala besar adalah pasar yang dibangun Pemerintah, swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa *Mall*, *Supermarket*, *Department Store*, dan *Shopping Centre* dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
- c. Pengertian pedagang informal adalah perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri berdasarkan azas kekeluargaan.
- d. Tenaga kerja asing diperkenankan bekerja pada perusahaan PMA dibidang perdagangan eceran (*retailer*) dengan ketentuan:
 - 1) maksimal 3 orang berlatar belakang pendidikan S1 atau setara dengan S1 dan berpengalaman kerja minimal 3 tahun dibidangnya sebagai *technical assistance* (pembantu teknis);
 - 2) untuk setiap 1 orang TKA, wajib memperkerjakan minimal 3 orang TKI sebagai tenaga ahli atau tenaga administrasi;

- 3) TKA tidak dibenarkan menduduki jabatan dibidang personalia.

e. Kewajiban lain bagi perusahaan PMA dibidang perdagangan eceran (*retailer*) adalah:

- 1) memperoleh Izin Usaha Pasar Modern bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern;
- 2) melakukan kerjasama dengan pedagang kecil, menengah, koperasi dan pasar tradisional melalui pola kemitraan;
- 3) mengikuti jam kerja pasar modern yaitu dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- 4) mencantumkan harga pada barang yang dijual yang dinyatakan dalam rupiah (Rp);
- 5) memiliki gudang;
- 6) menerapkan manajemen modern.

f. Larangan bagi perusahaan dibidang perdagangan eceran (*retailer*) adalah:

- 1) merangkap sebagai distributor/pedagang besar (*wholesaler*) dan sebagai pedagang informal;
- 2) menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang untuk tujuan spekulasi dan barang-barang yang sifatnya berbahaya.

Tabel. 2 Lembaga-Lembaga Pendukung Pengembangan Usaha Kecil (UK)

Lembaga Pendukung	Peran Yang dilakukan	Program atau Intervensi
1. Pemerintah :		
1.1 Deperin	Perumusan kebijakan pengembangan, implemantasi program, dan penyediaan fasilitas	1. pendidikan dan pelatihan 2. penelitian dan pengembangan teknoproduksi melalui R & D 3. Pelayanan teknis melalui UPT 4. Pelayanan informasi dan konsultasi 5. Perantara UK dengan bapak angkat
1.2 Depdikbud	1. peningkatan SDM melalui semua jalur : formal, informal, dan nonformal. 2. Konsep link dan match antara dunia dengan dunia pendidikan 3. Orientasi pendidikan sangat bias	1. Program magang 2. Pembinaan kursus-kursus informal 3. Pelatihan melalui pendidikan masyarakat
1.3 Depnaker	1. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja 2. Perumusan kebijakan ketenagakerjaan	1. Pelatihan melalui BLK 2. Pengembangan pusat informasi 3. Penetapan KUM dan monitoring-nya
1.4 Depsos	Pembinaan UK sebagai bagian upaya pengentasan kemiskinan	Pelatihan-pelatihan
1.5 Depkeu	Control pelayanan financial bagi usaha kecil	Penyederhaan prosedur pelayanan financial
1.6 Bappenas	Mekanisme control terhadap lembaga pelaksana IDT sangat lemah	Pemetaan desa miskin

1.7 Depkop dan PPK	Merumuskan kebijakan pengembangan UK	Peningkatan SDM
--------------------	--------------------------------------	-----------------

Tabel. 2 Lembaga-Lembaga Pendukung Pengembangan Usaha Kecil (UK) (Lanjutan)

1.8 Pemda bersama Bappeda dan Dinas tata kota	Pengaturan tata kota	Penyediaan fasilitas tempat usaha
2. Lembaga Swasta dan perorangan	Peningkatan SDM melalui pendidikan dan latihan	Pengembangan SDM
3.LSM	Koordinasi antar-LSM maupun lembaga pendukung lainnya sangat minim	Penelitian dan konsultasi
4. Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi	Penelitian dan pengembangan teknologi produksi serta sumber daya manusia	Konsultasi dan pembinaan
5. Asosiasi Pengusaha kecil	Idealnya, asosiasi seperti ini terlibat langsung dalam negoisasi, serta perumusan kebijakan	Distribusi informasi

Sumber : Kuncoro : 2007, 307

B. Teori Investasi

Penanaman investasi sering dilakukan melalui Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Beberapa pengertian investasi menurut beberapa ahli ekonomi:

Menurut Sadono Sukimo (1994:76) investasi adalah “ Penanaman modal oleh para pengusaha yang ditentukan oleh dua faktor, yaitu efisiensi modal dan tingkat bunga”.

Winardi (1988:98) juga berpendapat bahwa “ Investasi adalah pengeluaran untuk barang-barang yang tidak dikonsumsi sekarang melainkan menambah jumlah barang-barang atau alat-alat produksi”.

Sedangkan menurut Herbert E. Daugall (1996:1) berpendapat tentang investasi bahwa:

Investment in the commitment of funds for the purpose of deriving future income in from of interest, rent, or retirement benefits, or appreciation in the value of principal.” (Investasi adalah kewajiban untuk memberikan dan adegan maksud mendapatkan di masa depan, dalam bentuk bunga, deviden, sewa atau membawa manfaat, atau penghargaan dalam nilai pokok”.

Investasi merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan akan berubah-ubah dan perubahan besar dalam investasi akan sangat berpengaruh terhadap permintaan agregat dan akhirnya akan berakhir pada output dan kesempatan kerja sehingga akan mengakibatkan perbaikan pada pendapatan. Bagi kalangan investor mengadakan investasi dengan harapan bahwa pembangunan pabrik baru atau membeli mesin-mesin baru akan mendatangkan keuntungan, yaitu peningkatan hasil penjualan yang melebihi biaya-biaya investasi itu sendiri.

Winardi (1988:98) menyatakan sebagai berikut perusahaan-perusahaan mengadakan investasi agar memperoleh keuntungan barang-barang modal yang berumur lebih dari satu tahun maka keputusan untuk investasi tergantung pada:

1. Tingkat permintaan atas output yang dihasilkan investasi baru.
2. Tingkat suku bunga dan pajak yang mempengaruhi

3. Eksploitasi dan perkiraan kalangan usahawan atas situasi ekonomi di masa yang akan datang”.

Sedangkan menurut Sadono Sukirno (1994:106) investasi dapat diartikan “sebagai pengeluaran / pembelanjaan penanam modal atau perusahaan membeli barang-barang dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian”.

Pertambahan jumlah barang ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang.

Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang sudah lama yang telah haus dan perlu didepresiasi.

Di samping itu Sadono Sukirno (1994:109) juga mengemukakan beberapa faktor utama yang menentukan investasi, yaitu:

1. Tingkat keuntungan investasi yang akan diramalkan akan diperoleh.
2. Tingkat bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan”.

Sri Handayu Yulianti (1996:22) juga ikut menambahkan mengenai pengertian investasi menurutnya “investasi sebagai cara penanaman modal, baik

langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat (keuntungan) tertentu sebagai hasil penanaman modal tersebut”.

Bagi kalangan investor, mengadakan investasi dengan harapan bahwa perkembangan pabrik baru membeli mesin-mesin baru akan mendatangkan keuntungan, yaitu peningkatan hasil penjualan yang melebihi biaya-biaya investasi itu sendiri (Sri Handayu Yuliati,1996:22).

Investasi adalah suatu kata dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Kata tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan (Wikipedia : 2007).

Investasi adalah aktivitas penempatan modal ke dalam sebuah usaha tertentu yang memiliki tujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan atau keuntungan (Institute Forex Indonesia : 2007).

Istilah lain dalam investasi adalah *Working money* yang dapat diartikan investasi lebih terarah kepada mengaktifkan uang agar ia bisa bekerja untuk anda, bukan mengaktifkan diri agar anda bekerja untuk uang (Institute Forex Indonesia : 2007).

- Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh termasuk membangun rel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di universitas. Untuk lebih jelasnya, investasi juga

adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus $PDB = C + I + G + NX$.

Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik, mesin, dll) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya $I = (Y, i)$. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

- Kaitannya dengan keuangan, investasi berarti membeli sekuritas atau bentuk keuangan lainnya atau aktiva kertas, sebagai contoh investasi ekuitas/saham, Valuta Asing atau obligasi atau perangko. Investasi ini memungkinkan akan memberikan arus kas di masa depan dan mungkin akan menambah atau mengurangi nilainya.
- Klub Investasi adalah kelompok individu yang bertemu secara berkala untuk tujuan investasi uang, lebih sering pada saham dan sekuritas yang diperdagangkan secara umum (Wikipedia : 2007).

Bentuk-bentuk investasi adalah sebagai berikut :

1. Investasi tanah diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah; harga tanah akan meningkat di masa depan.
2. Investasi pendidikan dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian, diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar.
3. Investasi saham diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja atau penelitian (Wikipedia : 2007).

Ada dua jenis Investasi (Sharpe, Alexander, Bailey : 2005, 1) :

1. Investasi nyata (*real investment*) secara umum melibatkan asset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik
2. Investasi keuangan (*financial investment*) melibatkan kontrak-kontrak tertulis, seperti saham biasa dan obligasi.

Pada perekonomian primitif, hamper semua investasi merupakan investasi nyata, sedangkan di perekonomian modern, lebih banyak dilakukan investasi keuangan. Lembaga-lembaga untuk investasi keuangan yang berkembang pesat memberi fasilitas untuk investasi nyata. Jadi kedua bentuk investasi bersifat komplementer, bukan kompetitif.

Resiko investasi

Investasi selain juga dapat menambah penghasilan seseorang juga membawa resiko keuangan bilamana investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah faktor keamanan (baik dari

bencana alam atau diakibatkan faktor manusia), ketertiban hukum, dan lain-lain (Wikipedia : 2007).

Empat kriteria dasar dalam menentukan dasar perencanaan Investasi sebagai berikut (Finance Rool : 2007) :

1. Tujuan keuangan spesifik (*needs and expectations*)
2. Jangka waktu yang dibutuhkan (*time horizon*)
3. Tolerance terhadap resiko
4. Pilihan berbagai investasi berdasarkan kebijakan investasi.

Tata cara penanaman Modal

Berkenaan dengan berbagai peraturan mengenai penanaman modal, tentunya yang dijadikan acuan dasar adalah undang-undang (Widjaya : 2000, 1).

Undang-Undang yang dimaksudkan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing-PMA.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman dalam negeri-PMDN.

Sehubungan dengan penanaman modal tersebut perlu diperhatikan pula mengenai Tata Cara Penanaman Modal yang diatur melalui Keputusan Presiden RI No.97 Tahun 1993, kemudian diubah dengan Keputusan Presiden RI No.97 Tahun 1993, kemudian diubah dengan Keputusan Presiden RI No.115 Tahun 1998 dan selanjutnya mengalami perubahan lagi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 117

Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal (Widjaya : 2000,1).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan / disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengatur mengenai pengertian Modal Asing (Widjaya : 2000, 23).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan kekayaan oleh masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal (Widjaya : 2000, 23).

Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal

Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal terdiri dari bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal dan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga Negara asing dan atau badan hukum asing adalah sebagai berikut (Widjaya : 2000, 78) :

1. Bidang Usaha yang tertutup Mutlak untuk penanaman modal
 - a. Sektor Primer

1. Budidaya dan pengolahan Ganja dan sejenisnya
2. pemanfaatan dan pengusahaan bunga karang.
3. kontraktor di bidang pembalakan hutan
4. penambangan uranium

b. Sektor Sekunder

1. Usaha Pembuatan Senyawa Chlorophenol, DDT, Dieldrin, Clordane.
2. Usaha Pulp dengan proses Sulfit dan usaha pulp dengan pemutihan chlor.
3. Usaha Chlor Alkali dengan Proses Merkuri.
4. Usaha Chloro Fluoro Carbon (CFC/Freon)
5. Usaha Siklamat dan Sakarin
6. Pengolahan barang jadi / setengah jadi kayu bakau.
7. minuman keras/ minuman beralkohol
8. petasan dan kembang api
9. bahan peledak dan komponennya.
10. percetakan kertas berharga

2. Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga Negara asing dan atau Badan Hukum Asing

a. Sektor Primer

1. Budidaya Ikan Air Tawar

2. Hak pengusahaan Hutan (HPH)
- b. Sektor Tersier
1. Angkutan Taksi / Bis
 2. Pelayaran Rakyat
 3. Stasiun penyiaran televisi swasta, jasa penyiaran radio, surat kabar dan majalah
 4. usaha perfilman dan pengusahaan gedung bioskop
 5. manajemen spectrum frekuensi radio dan orbit satelit
 6. jasa perdagangan dan jasa penunjang perdagangan
 7. jasa pelayanan medik

C. Kesempatan Kerja

Dalam menciptakan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan tersebut yang dalam rangka pembangunan ekonomi terutama untuk penyerapan tenaga kerja, maka lebih diarahkan kepada pengembangan usaha padat karya.

Menurut Jayati Hasibuan (1989:148) adalah “ Bahwa lapangan kerja bisa diciptakan bilamana terdapat investasi. Masalah yang dihadapi bukan hanya meningkatkan volume investasi tetapi juga mengarahkan peningkatan investasi ke sektor-sektor yang padat karya, sehingga dengan dana investasi yang terbatas dapat dimaksudkan penciptaan lapangan kerja produktif”.

Dalam hal ini akan diusahakan agar cara produksi lebih mengutamakan penggunaan tenaga kerja yang dalam kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat diharapkan terjadi pemerataan hasil pembangunan terutama dalam pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dikemukakan bahwa Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja yang harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh disemua sektor, dalam hubungan ini program-program pembangunan sektor maupun regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan”.

- **Pengertian Kesempatan Kerja, Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja**

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja (Wikipedia : 2007).

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian

kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja (Wikipedia : 2007).

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, jumlah penduduk yang banyak tidak selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan, seperti bagan di bawah ini (Wikipedia : 2007)

Dari bagan di atas terlihat bahwa angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja. Usia Kerja adalah suatu tingkat umur seseorang yang diharapkan sudah dapat bekerja dan menghasilkan pendapatannya sendiri. Usia kerja ini berkisar antara 14 sampai 55 tahun. Selain penduduk dalam usia kerja, ada juga penduduk di luar usia kerja, yaitu di bawah usia kerja dan di atas usia kerja. Penduduk yang dimaksud yaitu anak-anak usia sekolah dasar dan yang sudah pensiun atau berusia lanjut (Wikipedia : 2007).

Bagian lain dari penduduk dalam usia kerja adalah bukan angkatan kerja. Yang termasuk di dalamnya adalah para remaja yang sudah masuk usia kerja tetapi belum bekerja atau belum mencari pekerjaan karena masih sekolah. Ibu rumah tangga pun termasuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja (Wikipedia : 2007).

Penduduk dalam usia kerja yang termasuk angkatan kerja, dikelompokkan menjadi tenaga kerja (bekerja) dan bukan tenaga kerja (mencari kerja atau menganggur). Tenaga Kerja (*man power*) adalah bagian dari angkatan kerja yang berfungsi dan ikut serta dalam proses produksi serta menghasilkan barang atau jasa (Wikipedia : 2007).

B. Pengertian dan Jenis Pengangguran

Pada keadaan yang ideal, diharapkan besarnya kesempatan kerjasama dengan besarnya angkatan kerja, sehingga semua angkatan kerja akan mendapatkan pekerjaan. Pada kenyataannya keadaan tersebut sulit untuk dicapai. Umumnya kesempatan kerja lebih kecil dari pada angkatan kerja, sehingga tidak semua angkatan kerja akan mendapatkan pekerjaan, maka timbullah pengangguran (Wikipedia : 2007).

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam (Wikipedia : 2007) yaitu :

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

2. Pengangguran Terselubung (*Disguessed Unemployment*)

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal. Contoh: Pada sebuah kantor terdapat 10 tenaga administrasi yang menangani pekerjaan yang ada. Padahal dengan jumlah tenaga 6 orang saja semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Akibatnya para pegawai tersebut bekerja tidak optimal dan bagi kantor tentu merupakan suatu pemborosan.

3. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang

buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

Apabila digambarkan dengan bagan, maka jenis pengangguran ini akan nampak sebagai berikut:

Bila ditinjau dari sebab-sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu:

1. Pengangguran Friksional (*Transisional*).

Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda.

Contoh:

- Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor usaha, untuk sementara menganggur.
- Berhenti dari pekerjaan yang lama, mencari pekerjaan yang baru yang lebih baik

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain. Contoh: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah usaha, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur.

3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural

Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Contoh: Di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan.

4. Pengangguran Musiman (*Seasonal*)

Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh: pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern.

Contoh :sebelum ada penggilingan padi, orang yang berprofesi sebagai penumbuk padi bekerja, setelah ada mesin penggilingan padi maka mereka tidak bekerja lagi.

6. Pengangguran Politis

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran. Misalnya penutupan Bank-bank bermasalah sehingga menimbulkan PHK.

7. Pengangguran Deflatoir

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.

D. Definisi Konsepsional

Batasan-batasan dan indikator variabel yang berhubungan dalam penelitian mi sebagai berikut:

1. Investasi adalah penggunaan pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang untuk konsumen atau penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan. Selama 1 jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh hasil yang teratur dengan suatu keamanan yang maksimum.
2. Usaha kecil menengah yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, bertujuan untuk memperoleh barang ataupun jasa untuk dipeniagakan secara komersial. Dengan nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk bangunan.

E. Kerangka Pikir

Dasar konsep teori yang telah di kemukakan maka dapat dibuat kerangka pikir sebagai berikut :

disebabkan adanya bagian dari tenaga kerja yang tidak sesuai dengan perusahaan-perusahaan, instansi-instansi pemerintah, serta usaha kecil menengah, dll.

F. Hipotesis

Dari uraian yang di kemukakan di duga bahwa **Investasi pada Usaha Kecil menengah mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan.**

BAB III

METODE PENDEKATAN

A. Definisi Operasional

Untuk melihat suatu gambaran yang jelas mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka variabel-variabel penelitian dijabarkan dalam indikator-indikator yang dapat diukur seperti tertera dibawah ini.

Yang dimaksud investasi dalam penelitian ini adalah investasi atau modal yang ditanamkan pada sektor industri kecil menengah baik yang dilakukan pihak domestik maupun asing (*foreign*) di Kabupaten Bulungan dari tahun 1999-2006.

Usaha kecil menengah yang dimaksud di sini adalah bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan yang mempunyai peranan untuk dapat menyerap kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Bulungan dari tahun 1999-2006.

Yang dimaksud kesempatan kerja di sini adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk dijadikan satu langkah untuk mengatasi jumlah pengangguran yang ada dari tahun 1999-2006.

B. Rincian Data Yang di Perlukan

Agar dapat diperoleh sasaran dalam penulisan ini maka untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi diperlukan data sebagai berikut:

1. Perkembangan jumlah investasi yang ditanamkan pada sektor industri kecil menengah di Samarinda dan tahun 1999 sampai dengan 2006.
2. Perkembangan jumlah kesempatan kerja yang terserap pada sektor industri kecil menengah di Samarinda tahun 1999 sampai dengan 2006.
3. data lainnya yang menunjang penelitian ini.
4. Jangkauan Penelitian

C. Jangkauan Penelitian

Guna membatasi ruang lingkup penelitian ini penulis mengambil lokasi khususnya di Kabupaten Bulungan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan data yang dipublikasikan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian pengumpulan data dilakukan pada instansi tersebut.

Sebagian besar kegiatan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan. Dimensi waktu data yang diteliti yaitu sejak tahun 1999-2006.

D. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis data yang akan di analisis dan di bahas yakni data sekunder, maka dalam penelitian ini tidak dilakukan pengambilan sampel (non

sampling). Sedangkan cara atau teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua kegiatan yaitu:

1. Field Work Research (Riset Lapangan)

Teknik ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan yakni mendatangi Kantor Departemen Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bulungan, dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan. Bertujuan untuk memperoleh data maupun informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah melakukan pencatatan laporan-laporan resmi.

2. Library Research (Riset Kepustakaan)

Untuk mendukung penulisan ini dan terutama memperoleh dasar pemikiran teoritis, maka akan dilakukan studi kepustakaan dengan mengkaji serta membaca buku-buku literatur ekonomi dan laporan atau brosur-brosur lainnya.

3. The Internet

Dengan melakukan pencarian data-data yang berhubungan dengan penelitian melalui situs-situs (*World Wide Web addresses*) atau browsing internet (Yahoo, Google, Altavista, Lycos)/

E. Alat Analisis Dan Pengujian Hipotesa

SPESIFIKASI MODEL

Dalam menganalisis data untuk mengetahui besarnya pengaruh **investasi** yang ditanamkan pada industri kecil menengah terhadap penyerapan **tenaga kerja** pada industri tersebut khususnya di Kabupaten Bulungan.

Sehingga model ekonomi penyerapan tenaga kerja pada industri kecil menengah dapat ditulis sebagai berikut (Widarjono, 2005 : 35) :

$$N = f(I)$$

Dimana :

N : Penyerapan Tenaga kerja

I : Investasi

Sehingga dapat dinotasikan ke dalam fungsi produksi Cobb-Douglas yang dirumuskan sebagai berikut (Dornbusch, Fisher, Startz : 194) :

$$N = A \cdot I^\alpha$$

Di mana N adalah Penyerapan tenaga kerja, A adalah intersep, I adalah Investasi, serta α adalah konstanta.

Pengaruh **investasi** pada industri kecil menengah terhadap penyerapan **tenaga kerja** pada industri tersebut khususnya di Kabupaten Bulungan, dapat diturunkan menjadi model ekonometrika, sehingga hubungan linearnya dapat ditulis dalam persamaan regresi sederhana atau OLS (*Ordinary Least Square*) Metode kuadrat terkecil sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i \quad \beta_1 < 0 \quad (\text{Widarjono, 2005 : 28})$$

Dimana untuk memperoleh :

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$$

Sedangkan untuk mencari :

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

Agar dalam mengestimasi persamaan regresi sederhana atau OLS (*Ordinary Least Square*) tidak mendapatkan estimator yang tidak bias, linear dan mempunyai varian yang minimum (BLUE) *best linear unbiased estimator* maka model regresinya dapat dibentuk ke dalam log linear sehingga dapat ditulis sebagai berikut (Widarjono, 2005 : 254) :

$$\ln Y_i = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_i$$

Dimana :

Y_i = Penyerapan tenaga kerja

X_i = Investasi pada Industri kecil menengah

i = observasi ke 1, 2, 3, 4, ..., n^1

Untuk mengetahui apakah hasil penelitian yang dilakukan cukup erat hubungannya dengan hipotesis yang dinyatakan atau tidak, maka dilakukan pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan uji t : (Widarjono, 2005 : 58)

1. Uji hipotesis negatif satu sisi

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

2. menghitung nilai statistik t (t hitung) dan mencari nilai t kritis dari tabel distribusi t pada α dan *degree of freedom* tertentu. Adapun nilai t hitung dapat dicari dengan formula sebagai berikut :

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{se\left(\hat{\beta}_1\right)}$$

Dimana β_1 merupakan nilai pada hipotesis nul.

3. Membandingkan nilai t hitung dengan t kritisnya. Keputusan menolak atau menerima H_0 sebagai berikut :
- Jika nilai t hitung > nilai t kritis maka H_0 ditolak atau menerima H_a
 - Jika nilai t hitung < nilai t kritis maka H_0 diterima atau menolak H_a

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Keadaan Penduduk dan Penyebarannya

Penduduk Kabupaten Bulungan sebagian besar adalah penduduk yang berasal dari daerah yang terdiri dari berbagai suku, seperti Kutai, Dayak, Banjar, Bugis, Jawa, Madura, Buton, Sunda, Ambon, Batak, Melayu, WNI keturunan Cina atau asing dan lain sebagainya.

Perkembangan penduduk di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2005

Golongan Umur	Jenis Kelamin		jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	31867	29100	60967
5-9	29939	27644	57583
10-14	26050	23865	49915
15-19	30317	28887	59204
20-24	39391	39619	79010
25-29	34586	33144	67730
30-34	31582	30787	62369
35-39	25828	24600	50428
40-44	21656	19909	41565
45-49	15870	12895	28765
50-54	12045	8886	20931

55-59	6228	5087	11315
-------	------	------	-------

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2005 (lanjutan)

Golongan Umur	Jenis Kelamin		jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
60-64	4.900	4.331	9.231
65-69	2.466	2.831	5.297
70-74	1.770	1.954	3.724
75+	1.644	1.813	3.457
Jumlah/ Total	316.139	295.352	611.491

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan (Samarinda dalam angka tahun 2005)

Tabel 9. Penyebaran dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan tahun 2005

Kecamatan	Penyebaran Penduduk			Pertumbuhan Penduduk	
	2003	2004	2005	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Palaran	38.771	41.142	43.890	6,12	6.68
Samarinda Ilir	100.110	107.323	111.496	7,21	3.89
Samarinda Seberang	85.738	88.153	94.519	2,82	7.22
Sungai Kunjang	86.656	88.636	93.606	2,29	5.61
Samarinda Ulu	107.547	105.409	106.501	-1,99	1.04
Samarinda Utara	142.650	149.270	161.479	4,64	8.18
Samarinda	561.471	579.933	611.491	3,29	5.44

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan (Samarinda dalam angka tahun 2005)

Sedangkan dari data penyebaran penduduk yang ada di Kabupaten Bulungan dari setiap kecamatan berbeda-beda jumlah penyebaran yang paling kecil jumlah penyebarannya di kecamatan palaran, sedangkan yang besar jumlah penyebaran penduduknya adalah di kecamatan Samarinda Utara. Dari tahun ke

tahun jumlah penyebaran penduduk yang ada di Kabupaten Bulungan selalu mengalami peningkatan, kecuali di kecamatan Samarinda Ulu yang jumlahnya tidak menentu atau fluktuatif.

Tabel. 10 Jumlah dan Distribusi Penduduk 15 Tahun keatas menurut Kegiatan Utama Tahun 2003-2005

Uraian Kegiatan (1)	2003 (2)	2004 (3)	Februari 2005 (4)	Agustus 2005 (5)
A. Angkatan Kerja	1.155.770	1.137.730	1.200.209	1.171.891
- Bekerja	1.077.379	1.041.494	1.119.335	1.078.094
- Mencari Kerja	78.391	96.236	80.874	93.797
B. Bukan Angkatan Kerja	716.796	767.176	700.901	774.285
- Sekolah	160.772	165.714	176.212	202.886
- Mengurus Rumahtangga	502.179	519.558	457.096	473.136
- Lainnya	53.845	81.904	67.593	98.263
Jumlah	1.872.566	1.904.906	190.110	1.946.176

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan (Samarinda dalam angka tahun 2005)

Sedangkan dari tabel distribusi penduduk 15 tahun keatas menurut kegiatan utamanya tahun 2003-2005. angka yang ditunjukkan juga tidak menentu artinya tidak ada angka dari satu tahun ke tahun berikutnya selalu mengalami kenaikan, tetapi angka yang ditunjukkan kadang naik tetapi kadang juga mengalami penurunan.

B. Perkembangan Usaha di Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan yang terkenal dengan sebutan “Kota Tepian” selama 8 tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, hal ini di sebabkan daerah usaha dan perdagangan sehingga semakin banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor usaha dan jasa terutama usaha kecil didirikan.

Sektor usaha dan jasa banyak memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah, hal ini memang wajar mengingat kedudukan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pemerintahan.

Pengembangan usaha ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan daerah, menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam dan energi serta sumber daya manusia.

Perkembangan pada sektor usaha cukup pesat, pada sektor usaha besar maupun usaha kecil. Jumlah perusahaan yang bergerak di sektor ini pada akhir tahun 2006, untuk sektor usaha besar berjumlah 23 dengan daya serap tenaga kerja 4084983 sedangkan untuk sektor usaha kecil berjumlah 23 dengan daya serap tenaga kerja 8932330.

Usaha kecil di Kabupaten Bulungan mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang tetap bertahan di bidangnya. selain jumlah perusahaan, nilai produksi dari sektor ini pun masih dapat dijadikan sebagai penunjang pertumbuhan di Kabupaten Bulungan.

Peningkatan usaha kecil ini tidak terlepas dari peran pemerintah melalui Dinas Perusahaan dan Perdagangan. Baik dorongan atau motivasi kepada pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya maupun memberikan kemudahan dan kelancaran dalam membuat surat izin usaha.

Untuk dapat melihat lebih jelas banyaknya penyerapan tenaga kerja yang terserap (*absorp*) pada usaha besar maupun kecil menurut skala usaha di Kabupaten Bulungan ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel.11 Banyaknya Tenaga Kerja Usaha Besar Menurut Skala Usaha di Kabupaten Bulungan untuk Tahun 1999-2006

NO	Banyaknya Usaha	Skala	Tahun (Year)							
			1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	makanan dan minuman	Besar	465310	463215	455092	498153	531367	605795	603251	601265
2	Tembakau	Besar	221680	223661	238702	242987	244525	237505	242365	243362
3	Tekstil	Besar	624830	614820	550822	535226	506869	501001	503663	506661
4	pakaian jadi	Besar	410689	427526	444712	424078	402765	397966	386765	365730
5	kulit dan barang dari kulit	Besar	469833	484844	266078	250823	232363	211762	201732	202680
6	kayu, barang dari kayu, dan anyaman	Besar	336921	346949	358737	358683	315873	312979	302672	380612
7	kertas dan barang dari kertas	Besar	96318	97317	108057	97414	110823	108658	103639	101362
8	penerbitan, percetakan dan reproduksi	Besar	42361	41041	32945	38529	35770	33959	30654	302620
9	batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan nuklir	Besar	2558	2660	1700	2529	3447	2300	2250	2263
10	kimia dan barang-barang dari bahan kimia	Besar	127369	167767	194191	173180	184200	176673	173610	171620
11	karet dan barang-barang dari plastik	Besar	252318	262142	301995	317482	305439	301748	300653	301680
12	barang galian bukan logam	Besar	119838	115818	127091	124211	121631	120940	118930	128921
13	logam dasar	Besar	55186	55285	55958	54329	54741	53768	52678	50679
14	barang-barang dari logam dan peralatannya	Besar	31098	84271	91784	93642	83075	102584	103573	102328
15	mesin dan perlengkapan	Besar	36465	34535	109643	98900	62697	65814	63843	62841
16	peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data	Besar	380	298	985	775	2608	2258	2136	2031
17	mesin listrik lainnya dan perlengkapannya	Besar	67165	66658	55112	67036	70405	713391	71679	71689
18	radio, televisi, dan peralatan komunikasi	Besar	136280	151790	74082	82698	118391	130219	134236	131281
19	peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, optik dan jam	Besar	192320	19568	15849	13525	15751	12586	11365	10329
20	kendaraan bermotor	Besar	41680	43708	44465	53587	58842	66926	67365	68310
21	alat angkut lainnya	Besar	59621	59720	56266	55486	60515	52487	53478	56780
22	furniture dan usaha pengolahan lainnya	Besar	228328	229229	230782	223790	218262	211329	210672	219170
23	daur ulang	Besar	732	845	208	870	557	765	773	769
TOTAL			4019280	3773518	3815256	3807933	3740916	3781413	3741982	4084983

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan

C. Perkembangan Investasi di Kabupaten Bulungan

Seperti yang telah di kemukakan dalam pembahasan bab II, bahwa investasi berkaitan erat dengan ekonomi dan keuangan. Tidak ada yang meragukan bahwa kedua bagian pengetahuan tersebut dikategorikan sebagai ilmu sosial atau umumnya dikenal dengan *soft science*, yang memiliki perbedaan signifikan dengan saudaranya *hard science* seperti Matematika, fisika dan kimia.

Meningkatnya perkembangan usaha yang tinggi atau terus meningkat setiap tahunnya, perlu adanya pengembangan investasi karena sektor usaha cukup potensial untuk dikembangkan. Perkembangan usaha kecil menengah jelas sekali kelihatan adanya peningkatan investasi diakibatkan karena meningkatnya permintaan produk yang dihasilkan oleh usaha kecil menengah dengan kata lain pasar untuk produksi usaha lebih luas dan memiliki prospek yang baik.

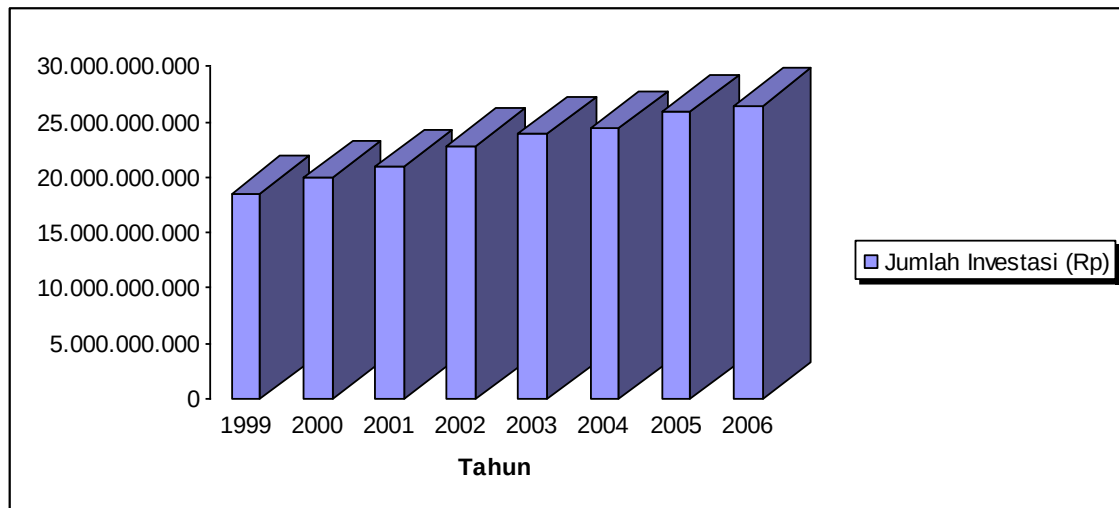
Untuk dapat melihat lebih jelas banyaknya perkembangan investasi (*investatation*) yang ditanamkan di sektor usaha kecil di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.13 Perkembangan Jumlah Investasi yang ditanamkan pada Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bulungan tahun 1999-2006

	Jumlah Investasi (Rp)
1999	18.534.783.300
2000	19.932.533.500
2001	20.959.042.550
2002	22.853.254.500
2003	23.936.261.000
2004	24.365.210.500
2005	25.936.673.000
2006	26.452.230.400
Total	182.969.988.750,00

Sumber : Dinas Perusahaan Kabupaten Bulungan

Diagram.14 Perkembangan Jumlah Investasi yang ditanamkan pada Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bulungan tahun 1999-2006



Sumber : Dinas Perusahaan Kabupaten Bulungan

Dari data jumlah perkembangan investasi yang ditanamkan pada usaha kecil menengah di Kabupaten Bulungan tahun 1999-2006 selalu mengalami kenaikan yang besar dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat dari gambar diatas. Contoh tahun 1999-2006. tahun 2000 jumlah investasi sebesar 19.932.535.500,- sedangkan tahun 2001 berjumlah 20.959.042.550,-. Dari data tersebut sudah jelas bahwa jumlah investasi yang ditanamkan pada usaha kecil menengah dari satu tahun ke tahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Ada beberapa hal yang menyebabkan :

1. Ketertarikan investor pada usaha kecil menengah sehingga berani menanamkan modalnya
2. jaminan keamanan dari pemerintah kepada para investor baik dalam maupun luar negeri.
3. adanya keuntungan dari menanamkan modal pada usaha kecil menengah
4. adanya kepercayaan dari para penanam modal terhadap prospek usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Bulungan.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Menganalisis pengaruh investasi pada sektor Usaha Kecil Menengah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan maka digunakan alat analisis sebagai berikut :

- Regresi sederhana atau OLS (*Ordinary Least Square*) Metode kuadrat terkecil.

1. Regresi sederhana atau OLS (*Ordinary Least Square*) Metode kuadrat terkecil.

Adapun rumus Regresi sederhana atau OLS (*Ordinary Least Square*) Metode kuadrat terkecil untuk menganalisis pengaruh investasi pada sektor Usaha Kecil Menengah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i \quad \beta_1 < 0$$

Dimana :

Y_i = Penyerapan tenaga kerja

X_i = Investasi pada Usaha kecil menengah

I = observasi ke 1, 2, 3, 4, ..., n^1

Tabel.15 Data Investasi pada usaha kecil menengah dan penyerapan tenaga kerja pada tahun 1999-2006

Tahun	Penyerapan tenaga Kerja (Y)	Investasi pada usaha kecil menengah (X)
1999	544,342	18.535
2000	593,298	19.933
2001	567,532	20.959
2002	556,936	22.853
2003	532,964	23.936
2004	543,569	24.365
2005	812,909	25.937
2006	893,233	26.452

Agar dalam mengestimasi persamaan regresi sederhana atau OLS (*Ordinary Least Square*) tidak mendapatkan estimator yang tidak bias, linear dan mempunyai varian yang minimum (*BLUE*) *best linear unbiased estimator* maka model regresinya dapat dibentuk ke dalam log linear sehingga dapat ditulis sebagai berikut :

$$\ln Y_i = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_i$$

Sehingga dari tabel 15 untuk Data Investasi pada usaha kecil menengah dan penyerapan tenaga kerja pada tahun 1999-2006 dapat di log linearkan sebagai berikut :

Tabel.16 Data Investasi pada usaha kecil menengah dan penyerapan tenaga kerja pada tahun 1999-2006 setelah di Log-Linear

Tahun	Ln (Penyerapan tenaga kerja)	Ln (Investasi pada usaha kecil menengah)
1999	6,299577726	9,827404424
2000	6,385696802	9,900108525
2001	6,341297135	9,950325458
2002	6,322450332	10,03684882
2003	6,27845388	10,08314978
2004	6,298156653	10,10091159
2005	6,700619172	10,16341319
2006	6,794847465	10,18309576

Dengan menggunakan program (*software*) **Eviews** maka hasil yang diolah linear pada tabel 16 untuk Data Investasi pada usaha kecil menengah dan penyerapan tenaga kerja pada tahun 1999-2006 dapat diregresikan sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Regresi sederhana dengan program Eviews

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/16/07 Time: 13:34
Sample: 1999 2006
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.566093	5.103297	-0.698782	0.5109
X	0.996370	0.508768	1.958396	0.0979
R-squared	0.389953	Mean dependent var	6.427500	
Adjusted R-squared	0.288279	S.D. dependent var	0.200196	
S.E. of regression	0.168893	Akaike info criterion	-0.506788	
Sum squared resid	0.171149	Schwarz criterion	-0.486927	
Log likelihood	4.027151	F-statistic	3.835316	
Durbin-Watson stat	0.873144	Prob(F-statistic)	0.097913	

$$\ln Y_i = -3,56 + 0,99 \ln X$$

$$se \quad (5,103) \quad (0,50)$$

$$R^2 = 0,38$$

Persamaan regresi ini terdiri dari intersep sebesar -3,56 dan slope sebesar 2,06. besarnya slope + 0,99 berarti jika investasi yang ditanamkan pada usaha kecil menengah dianggap satu juta rupiah maka diprediksi penyerapan tenaga kerja akan bertambah sebesar 990 orang.

Atau dapat dimasukkan ke dalam fungsi cobb-Douglas sebagai berikut :

$A = -3,56$ yang kemudian di Anti_log menjadi 0,028.

$$N = A \cdot I^\alpha$$

$$N = 0,028 \cdot I^{0,99}$$

Yang artinya jika investasi naik sebesar 1% maka penyerapan tenaga kerja naik sebesar 0,99 %.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ maka langkah uji hipotesis sebagai berikut:

4. Uji hipotesis negatif satu sisi

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

5. menghitung nilai statistik t (t hitung) dan mencari nilai t kritis dari tabel distribusi t pada α dan *degree of freedom* tertentu. Adapun nilai t hitung dapat dicari dengan formula sebagai berikut :

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{se(\hat{\beta}_1)}$$

$$t = \frac{0,99 - 0}{0,50} = 1,98$$

Dimana nilai 0 merupakan nilai β_1 dalam hipotesis nul. Sedangkan nilai t kritis diperoleh dari t tabel yakni sebesar 1,895 dengan $\alpha = 5\%$ dan df (*degree of freedom*) sebesar 7 yakni 8-1.

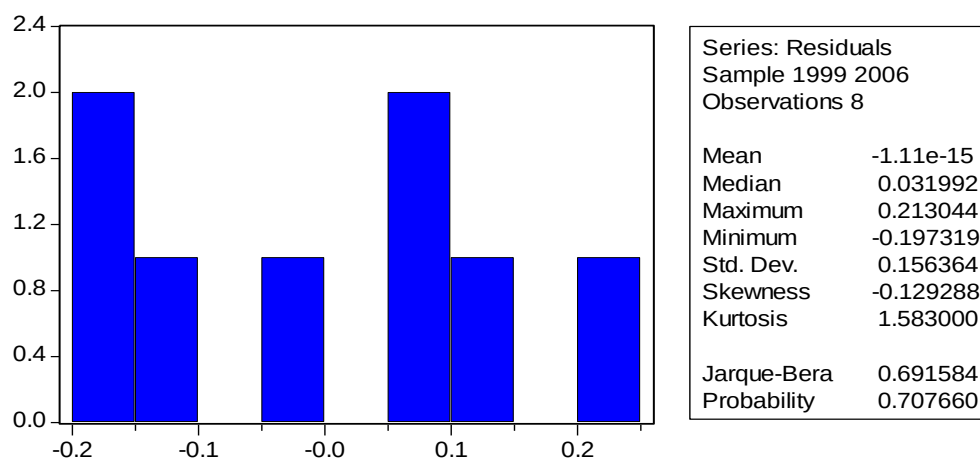
6. Membandingkan nilai t hitung dengan t kritisnya. Keputusan menolak atau menerima H_0 sebagai berikut :
- Jika nilai t hitung > nilai t kritis maka H_0 ditolak atau menerima H_a
 - Jika nilai t hitung < nilai t kritis maka H_0 diterima atau menolak H_a

Keputusannya karena $t_{hitung} > \text{nilai } t_{kritis}$ yakni $1,98 > 1,895$ maka H_0 ditolak atau menerima H_a . Artinya Investasi pada Usaha Kecil menengah mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan.

2. Uji Normalitas

Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang didapatkan mempunyai distribusi normal. Untuk mengetahuinya dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar.18 Histogram Residual-Uji Normalitas



Berdasarkan gambar 18 maka dapat di lihat pada Jarque-Bera atau uji statistik JB, nilai statistik sebesar 0,691584 dengan probabilitasnya cukup besar yaitu 70,76 %. Yang artinya nilai probabilitas dan nilai statistik dari JB ini tidak signifikan atau besar yang artinya menerima hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik JB mendekati nol. Dengan kata lain, residual

hasil regresi pengaruh Investasi pada usaha kecil menengah terhadap penyerapan kesempatan kerja mempunyai distribusi normal.

B. Pembahasan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif atau mempunyai pengaruh yang kuat antara penanaman investasi pada usaha kecil menengah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan.

Dalam teori ekonomi bahwa sebenarnya investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini didasarkan dengan asumsi pikiran bahwa dengan adanya penanaman investasi yang maka kelangsungan suatu perusahaan atau usaha tetap akan ada (*exist*). Sebagai contoh : penggunaan teknologi yang canggih, dan lain-lain. Tentunya untuk mendapatkan teknologi tersebut dibutuhkan investasi baik itu asing (*foreign*) atau domestik.

Untuk itu suatu usaha akan memerlukan jumlah tenaga kerja yang lebih besar daripada jumlah sebelumnya. Tetapi perusahaan juga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja, dengan syarat mempunyai teknologi yang cukup canggih. Karena walaupun jumlah tenaga kerja banyak dengan teknologi yang minim tentunya akan menghasilkan produktivitas yang belum maksimal, apabila dibandingkan dengan teknologi yang bagus didukung tenaga yang handal, maka akan menghasilkan produktivitas yang maksimal bahkan dapat menghemat waktu. Sebagai contoh perbandingan antara usaha penerbangan dengan usaha kerajinan. Tentunya dalam hal ini usaha membutuhkan investasi yang sangat besar,

membutuhkan tenaga kerja yang pintar (biaya pelatihan) dibandingkan dengan usaha kerajinan.

Berdasarkan analisis diatas maka hipotesis yang menyatakan bahwa Investasi pada Usaha Kecil menengah mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan terbukti.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam pengujian hipotesis atau uji bahwa investasi mempunyai hubungan yang positif atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil menengah di Kabupaten Bulungan. Dalam teori ekonomi bahwa investasi mempunyai pengaruh yang positif atau ada hubungan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan fungsi Cobb-Douglas satu variable yaitu $N=0,028 I^{0,99}$ Yang artinya jika investasi naik sebesar 1% maka penyerapan tenaga kerja naik sebesar 0,99 %.
2. Bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah (*stock*) capital. Investasi akan menambah jumlah (*stock*) daripada kapital. Tanpa investasi maka tidak akan ada pabrik / mesin baru, dan dengan demikian tidak ada ekspansi.

B. Saran

Untuk dapat lebih menciptakan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja menengah melalui peningkatan investasi pada usaha tersebut maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. adanya usaha peningkatan permintaan produk usaha kecil menengah asal Kabupaten Bulungan dengan pengembangan pasar luar negeri

melalui kegiatan promosi yang lebih banyak dilakukan di negara-negara yang saat ini belum menjadi pengimpor bahan baku asal Kabupaten Bulungan.

2. dukungan dari pemerintah bagi pengembangan kegiatan usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Bulungan.
3. adanya jaminan keamanan baik dari pemerintah pusat maupun daerah kepada para investor.
4. harus adanya investasi dari para pengusaha untuk menyediakan teknologi yang baik tepat guna, untuk menjaga mutu yang lebih terjamin dan menjaga kepercayaan para konsumen pada mutu produk usaha kecil menengah di Kabupaten Bulungan.
5. pemerintah kota maupun pusat hendaknya selalu dapat meyakinkan para investor asing maupun dalam bahwa berinvestasi akan selalu menguntungkan terutama pada usaha kecil menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Abdurrachman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cetakan Keenam (Inggris-Indonesia), PT. Pradnya Paramita Pustaka Teknologi dan Informasi, Jakarta.
- Anonim, 2007, *Desain Industri*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.
- Anonim, 2007, *About Investasi*, Institut Forex Indonesia.
- Anonim, 2005, *Samarinda Dalam Angka 2005*, Badan Pusat Statistik Tingkat II Samarinda.
- Anonim, 2005, *Industri Besar dan Kecil di Indonesia*, Badan Pusat Statistik Tingkat II Samarinda.
- Anonim, 2007, *Dasar Perencanaan Investasi*, www. Finance Rool.
- Dornbusch, R, Fischer, S, Starts, R, 2001, *Macro Economics*, 8th Edition, McGraw-Hill. Newyork.
- Eko Restu Minto, 2005, *Identifikasi Daya Tarik Investasi Di Kawasan Industri Kota Samarinda*, Institute Teknologi Bandung Wikipedia.
- F. Sharpe, William, J. Alaxander, Gordon, V. Bailey, Jeffery, 2005, *Investasi*, PT. Indeks kelompok Gramedia.
- Gujarati, D (1978). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
- Hussey, J and Hussey, R, 2002, *Business Research, A Practical Guide For Undergraduate and Postgraduate Students*. Newyork.
- I.g. Rai Widjaya, 2000, *Penanaman Modal*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Otonomi Daerah dan Peluang Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mudjiono, 2005, *To Develop The Economic Development, Escpecially For The Investment In Industrial Sector, Either Domestic or Foreign Investors*, Institute Teknologi Bandung.
- Mudrajad Kuncoro, 2007, *Ekonomika Industri Indonesia*, Andi Yogyakarta.
- Sadono Sukirno, 1994, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Samarinda. Go.id/ *Perdagangan dan Investasi*, 2007.

Sri Handayu Yuliati, 1996, *Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Pertama Cetakan I, Andi, Yogyakarta.

Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Ekonisia.

Wikipedia.Org/wiki, 2006, “*The Free Encyclopedia* “.

Winardi, 1986, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, Alumni, Bandung.

Suryana, 2000, *Penjelasan Khusus Sektor Perindustrian dan Perdagangan*, Jakarta.